

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad S, Soemadi Praja dan Atmasasmita, R. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta.
- Jawahir Thotowi, 2012, Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum Berkeadilan, Bahan Kuliah, Program Pascasarjana S3 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Poerwadimanto, 1980, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Romli Atmasasmita, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Mukti Fajar, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- W.A.Bonger, 1987, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, PT. Pembangunan,.
- R.A.S. Soemadipradja, Romli Atmasasmita, 1989, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.
- Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Adnan Paslyadja, 1997, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Surabaya, Bina Aksara
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidna Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, sinar Grafika.
- Baharuddin Suryobroto, 2006, *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*, Jakarta, Prisma.
- Bambang Poernomo. 1995, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar grafika.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru., Bandung.

### **Paraturan Perundang – Undangan**

UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

### **Jurnal**

Jimly Asshddiqie, 2005, *Negara Hukum Indonesia : Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*, Makalah Pertemuan Nasional ormas-ormas Kristen, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2013, “*Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*” (Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013), (2013)

Maryanto, 2012, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Semarang, Jurnal Ilmiah IKIP PGRI Semarang.

Jodi Andika, Briyan. 2015. *Cuti Menjelang Bebas Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Narapidana*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Debora Yunita, Patricia. 2015. *Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Yuliana S, Endang dan Tri Wahyu Widiastuti. 2015. *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat*. Surakarta. Fakultas Hukum UNISRI Surakarta.

Rahman, samsu. 2013. *Analisis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung*. Lampung. Fakultas hukum universitas lampung.

Juprison Tampubolon, Martahan. 2016. *Kajian Kritis Atas Konsep Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Paskapemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012*. Yogyakarta. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pujiyono, 2012, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Vidya Prahassacitta, 2009. “ *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Internet**

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3601665/10-napi-korupsi-di-yogyakarta-dapat-remisi-umum>, tgl 12 April 2018 13.45 WIB

<https://www.facebook.com/notes/rhamoz-panggabean/apa-yang-menjadi-hak%20jika-kita-sebagai-narapidana-/10150723130061183>, tgl 12 April 2018 14.08 WIB

<http://m.semarangpos.com/2017/08/31/korupsi-kulonprogo-terdakwa-tak-hanya-terlibat-1-kasus-847561>, tgl 21 Mei 2018 07.30 WIB

<http://www.jatengpos.com/2017/08/korupsi-kulonprogo-terdakwa-pad-wijimulyo-ajukan-pledoi-847560>, tgl 21 Mei 2018 07.40 WIB

<http://www.rmol.co/read/2012/12/28/91828/Terdakwa-Kasus-Bank-DKI-Dihukum-Penjara-10-Tahun->, tgl 21 Mei 2018 07.50 WIB